

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Eksekutif perusahaan merupakan orang-orang yang menduduki jajaran direksi dan mengatur arah jalannya suatu perusahaan. Jajaran direksi merupakan bagian paling penting karena posisi berada paling atas dari seluruh jabatan untuk membawahi bagian-bagian tertentu. Dari jajaran direksi tersebut masih tetap dibutuhkan seorang leader yang disebut dengan direktur utama atau *Chief Executive Officer* (CEO) (Astuti, 2021).

Direksi pada perusahaan adalah salah satu bagian dari struktural perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional perusahaan. Dalam perusahaan yang menganut tata kelola *two tier system*, selain dewan direksi juga terdapat dewan komisaris yang memiliki tugas yaitu sebagai pengawas dari dewan direksi dan pemberi nasihat di perusahaan (Ramadhani, 2021). Laporan media Kompas menunjukkan bahwa sebanyak tiga ratus sembilan puluh tujuh komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkoneksi politik dan seratus enam puluh tujuh komisaris di anak perusahaan BUMN diketahui terkoneksi politik (Kompas.com, 2020). Namun demikian telah dikonfirmasi oleh Erick Tohir Menteri BUMN bahwasannya seorang yang memiliki koneksi politik diangkat menjadi komisaris di perusahaan bukan suatu tindakan terlarang.

Dalam mengelola bisnis, faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan terdiri dari berbagai aspek, salah satunya faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, termasuk pengaruh lingkungan politik. Lingkungan politik sering digunakan untuk memperbaiki kinerja dan memaksimalkan laba. Jalur politik perusahaan digunakan dengan tujuan memperbaiki kinerja dan memaksimalkan laba (Azizah & Amin, 2020).

Dalam dunia bisnis, Indonesia merupakan negara yang pengaruh politik paling tinggi (Harymawan & Nowland, 2016). Dengan adanya politik, peluang bisnis perusahaan akan lebih besar karena kemudahan untuk mendapat proyek-proyek dan akses pada kebijakan pemerintah (Boubakri *et al.*, 2008). Menurut Wulandari & Raharja (2013), bisnis dan politik saling berkaitan. Tujuan dari politik adalah merumuskan kebijakan publik untuk kepentingan dunia bisnis, begitu juga sebaliknya dunia bisnis dapat menunjang politik suatu negara. Koneksi politik di Indonesia biasanya dilakukan dengan memasukkan orang yang memiliki koneksi dengan partai politik atau pemerintah ke dalam susunan organisasi perusahaan (Sulistyowati & Prabowo, 2020). Suatu perusahaan diidentifikasi memiliki hubungan koneksi politik apabila setidaknya pemegang saham tertinggi perusahaan atau salah satu pejabat negara yaitu anggota parlemen, menteri atau yang memiliki hubungan erat dengan politisi atau partai politik (Faccio, 2006). Eksekutif puncak sebagai mantan pemerintah sebagai sumber daya politik membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif seperti pajak yang menguntungkan dan pinjaman bank (Charumillind *et al* 2006; Faccio, 2006; Claessens, 2008) yang pada akhirnya

meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan (Fisman, 2001; Johnson, S., & Mitton, 2003; Li *et al.*, 2018; Goldman, 2009).

Koneksi politik di Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dana pinjaman atau kredit perbankan dan mendapat kontrak proyek dari pemerintah (Wijantini, 2007). Perusahaan menginginkan adanya koneksi politik dengan tujuan untuk mendapat kemudahan dalam setiap aktivitas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan. Secara efektif dan efisien kinerja harus dioptimalkan karena kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan yang menjadi penilaian investor serta beban pertimbangan untuk pengambilan keputusan (Anthony, R., & Govindarajan, 2005). Bencheikh & Taktak (2017) menguji dampak lingkungan politik di negara demokratis (sejalan dengan karakteristik negara Indonesia), bahwa asset kinerja adalah koneksi politik. Hal ini menunjukkan hubungan politik memberi akses atau informasi yang mempengaruhi investor untuk menaruh kepercayaan mereka pada perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Menurut media Tirto.id (2020a), Gabriel menilai politik balas budi Jokowi terhadap semua pendukung merupakan tindakan yang buruk. Jika komisaris dipilih dengan cara jasa selama kampanye, perusahaan pelat merah bisa saja tidak optimal, jika disertai kompetensi tidak menjadi masalah.

Berikut ini adalah fenomena pencalonan pengusaha yang masuk ke dunia politik yang diangkat menjadi direksi atau komisaris karena balas budi keterlibatan secara politis bukan karena kompetesinya seperti Fadjoel Rachman mantan relawan pemenangan Jokowi-Kalla pada pemilihan presiden tahun 2014 ditunjuk menjadi komisaris PT Adhi Karya Tbk tahun 2015. Zuhairi ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk menjabat sebagai Komisaris Independen PT Yodya Karya. Pernah menjadi tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 (Tirto.id, 2020b). Ada juga perusahaan yang mengharapkan adanya koneksi politik seperti PT Arwana Citramulia Tbk yang mengangkat mantan menteri menjadi komisaris, mantan panglima daerah militer sebagai direktur.

Eksekutif perusahaan dalam konteks perusahaan di Indonesia adalah dewan komisaris dan dewan direksi pihak yang mendapat kompensasi paling tinggi dalam perusahaan dan paling diperhatikan dibandingkan dengan jabatan-jabatan lainnya (Maharani & Utami, 2019). Kompensasi merupakan semua pendapatan baik berbentuk uang, barang yang diterima oleh karyawan di suatu perusahaan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2014). Kompensasi langsung adalah upah yang dibayar secara tetap dengan berdasarkan pada kesepakatan tenggang waktu tertentu meliputi gaji, bonus dan Intensif. Selain kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kinerja. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian keuntungan diluar upah atau gaji bulanan biasanya

berupa uang tunai, fasilitas atau barang. Oleh sebab itu, perhatian perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil sangat diperlukan.

Kompensasi tinggi dapat dilihat dari bagaimana kinerja CEO dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. Kinerja perusahaan dinilai oleh pihak perusahaan ataupun pihak luar sehingga dapat ditentukan besaran kompensasi yang akan diterima (Lindrianasari, 2013). Pardede & Mardiyati (2016), menyatakan bahwa tanggung jawab CEO yang lebih berat maka kompensasi yang diterima oleh CEO berbeda dari karyawan biasa. Menurut Agrawal dan Khoerber (1997) yang dikutip oleh Suhartono & Sany (2015) perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih mendapat pendapatan tinggi dan produktivitas lebih besar karena politik merupakan unsur ekonomi yang penting terutama dalam hal provitabilitas. Di Indonesia akhir tahun 2016 kompensasi eksekutif pernah menjadi isu populer, gaji Gubernur Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 194,19 juta per bulan ditetapkan oleh DPR RI tahun anggaran 2016 gaji tersebut dua kali lipat gaji resmi Presiden RI yaitu sebesar Rp 62,74 juta (Gliemourinsie 2017)

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, Surah An-Nisa [4]: 29,

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ

*Artinya:* “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat suci Al-Qur'an diatas pada surat An-Nisa ayat 29, Allah telah memperingatkan bahwa janganlah saling memakan harta dengan jalan yang tidak benar. Termasuk dalam hal ini, eksekutif berupaya mendapatkan kompensasi tinggi tetapi tidak Amanah dalam menjalankan kewajiban untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan plat merah harus meningkatkan kinerjanya karena dengan begitu kompensasi yang diterima oleh eksekutif juga tinggi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Habibah (2018) seperti yang dikutip oleh Ligita & Muazaroh (2020), menunjukkan bahwa berpengaruh positif koneksi politik terhadap kinerja keuangan. Hasil mengindikasi bahwa perusahaan terkoneksi politik mempunyai kemampuan lebih baik dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari asset dan ekuitas yang perusahaan miliki. Demikian juga hasil penelitian Maaloul *et al* (2016) dalam penelitian Azizah & Amin (2020), yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif koneksi politik terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Maaloul *et al* (2016). Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, pada objek penelitian pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2018-2020. Periode ini digunakan untuk melihat kinerja perusahaan sebelum dan saat pandemic covid-19, periode 2018 dan 2019 menunjukkan kinerja sebelum

pandemic dan periode 2020 menunjukkan kinerja selama terkena dampak pandemic yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk menghasilkan laba. Penelitian ini juga menambah variabel kontrol, yaitu jenis industri dan tahun. Penelitian ini menggunakan variabel mediasi yaitu kinerja keuangan. karena pada penelitian Maaloul *et al* (2016) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara koneksi politik dengan kinerja sedangkan penelitian Pardede & Mardiyati (2016) menunjukkan pengaruh positif kinerja terhadap kompensasi. Dengan perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja perusahaan yang baik maka akan meningkatkan kompensasi.

Penelitian terkait koneksi politik, kinerja perusahaan dan kompensasi penting untuk dilakukan di Indonesia karena dewan direksi atau dewan komisaris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terindikasi mempunyai koneksi politik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fralich & Fan (2018) menyajikan bukti bahwa dewan yang merupakan anggota politik memberikan nilai strategis dihargai gaji tinggi. Koneksi politik yang dimiliki adalah strategi penting bagi perusahaan dalam mendapatkan akses sumber daya yang dikendalikan pemerintah dan menjadi factor penting dalam menentukan kompensasi. Penelitian Habibah (2018) seperti yang dikutip oleh Ligita & Muazaroh (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasilnya perusahaan terkoneksi politik mempunyai kemampuan lebih baik dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari asset yang perusahaan miliki. Penelitian Pardede & Mardiyati

(2016), menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam perusahaan berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kinerja Keuangan dalam Memediasi Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kompensasi”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah eksekutif perusahaan yang terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap kompensasi?
2. Apakah eksekutif perusahaan yang terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah kinerja eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap kompensasi?
4. Apakah kinerja keuangan memediasi pengaruh positif koneksi politik terhadap kompensasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menguji apakah eksekutif perusahaan yang terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap kompensasi.
2. Menguji apakah pengaruh eksekutif perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
3. Menguji apakah pengaruh kinerja eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap kompensasi.

4. Menguji apakah kinerja keuangan memediasi pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang koneksi politik, kinerja perusahaan dan kompensasi. Dengan memasukan kinerja perusahaan sebagai variabel pemediasi, diharapkan akan memberikan penjelasan apakah kompensasi yang diberikan kepada dewan direksi atau dewan komisaris yang terkoneksi politik terkait dengan kontribusi mereka terhadap kinerja perusahaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Perusahaan yang mengangkat anggota dewan komisaris dan direksi terkoneksi politik, dalam penentuan kompensasi tetap harus memperhatikan kontribusinya terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaku bisnis terkait hal yang melatarbelakangi tindakan direksi dan komisaris dengan koneksi politik terutama berkaitan dengan kinerja perusahaan dan kebijakan kompensasi.